

# KEAMANAN PERBATASAN SELAT MALAKA

Istin Marlana Dewi

Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut

pusjianmari@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.126>

## Abstrak

Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan. Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang merupakan *littoral states* atau dalam istilah lainnya adalah negara pantai, yaitu negara-negara yang memiliki suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut. Dalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut, dan lain lain. Dengan adanya interoperabilitas antar satuan keamanan laut perbatasan maka akan mudah untuk berkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diemban secara bersama-sama. Interoperabilitas adalah aplikasi yang berinteraksi dengan aplikasi lain melalui protokol yang disepakati bersama melalui jalur komunikasi. Terwujudnya *interoperabilitas* dalam keamanan maritim di perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka yaitu memotong jalur birokrasi, mampu menyatukan upaya dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan bersama sehingga lebih efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Selat Malaka, Keamanan, Maritim, *Interoperabilitas*

## Abstract

*The Malacca Strait, which is a strategic route under the sovereignty of three countries in Asia, namely Indonesia, Malaysia and Singapore, is very vulnerable to various crimes. Indonesia, Malaysia and Singapore, which are littoral states or in other terms are coastal countries, namely countries that have the same area, and are fully responsible for everything that happens in that area. In the maritime world, maritime security has also expanded not only to the concept of sea defense against military threats from other countries but also to include defense against non-military threats, including protection of natural preservation, trade routes, eradication of illegal actions at sea, and so on. With interoperability between border maritime security units it will be easy to coordinate and carry out the tasks carried out together. Interoperability is an application that interacts with other applications through a mutually agreed upon protocol through a communication line. The realization of interoperability in maritime security at the Indonesian sea border in the Malacca Strait, namely cutting bureaucratic lines, being able to unite efforts from various sources to achieve common goals so that they are more effective and efficient.*

**Keywords:** Malacca Strait, Security, Maritime, *Interoperability*

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang terjadi di perbatasan, khususnya perbatasan laut, memerlukan penanganan yang benar-benar terpadu dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, instansi terkait hingga militer negara.

Keamanan merupakan hal yang sentral dalam keamanan maritim karena menyangkut kepentingan lingkungan dan segala sesuatu yang terjadi di laut. Keamanan maritim juga semakin penting dan krusial karena industri maritim, perusahaan pelayaran dan karyawannya dapat secara bersamaan menjadi target dan target potensial *illegal actions*

Selat Malaka yang merupakan jalur strategis yang berada dibawah kedaulatan tiga negara di Asia yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura, sangat rentan dengan berbagai aksi kejahatan. Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang merupakan *littoral states* yaitu negara-negara yang memiliki suatu kawasan yang sama, dan bertanggung jawab penuh terhadap segala hal yang terjadi di kawasan tersebut. Ketiga negara ini memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan di perairan Selat Malaka. Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang terhadap Selat Malaka, sedangkan Malaysia dan Singapura merupakan negara yang kuat dalam sistem pertahanan dan keamanan terhadap SelatMalaka dan tidak dipungkiri

lagi bahwa Singapura memiliki kepentingan yang besar terhadap jalur perdagangan yangstrategis ini.

Singapura sebagai "*trading country*" telah diuntungkan secara geografis dan selat ini merupakan jantung bagi perekonomiannya. Sementara Indonesia juga mempunyai kepentingan terhadap stabilitas dan keamanan selat tersebut, mengingat Selat ini merupakan salah satu pintu masuk jalur perdagangan dari Eropa, Afrika, Timur Tengah dan Asia Selatan. Sebagaimana yang di terapkan di hukum internasional, selat malaka jatuh kedalam area perbatasan territorial negara-negara pantai, tugas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas selat di bebani kepada Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Negara-negara lain yang menikmati *transit passage* melalui selat malaka harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan negara-negara pantai.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam bentuk analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan literasi dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan media online lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Kerjasama Antar Negara

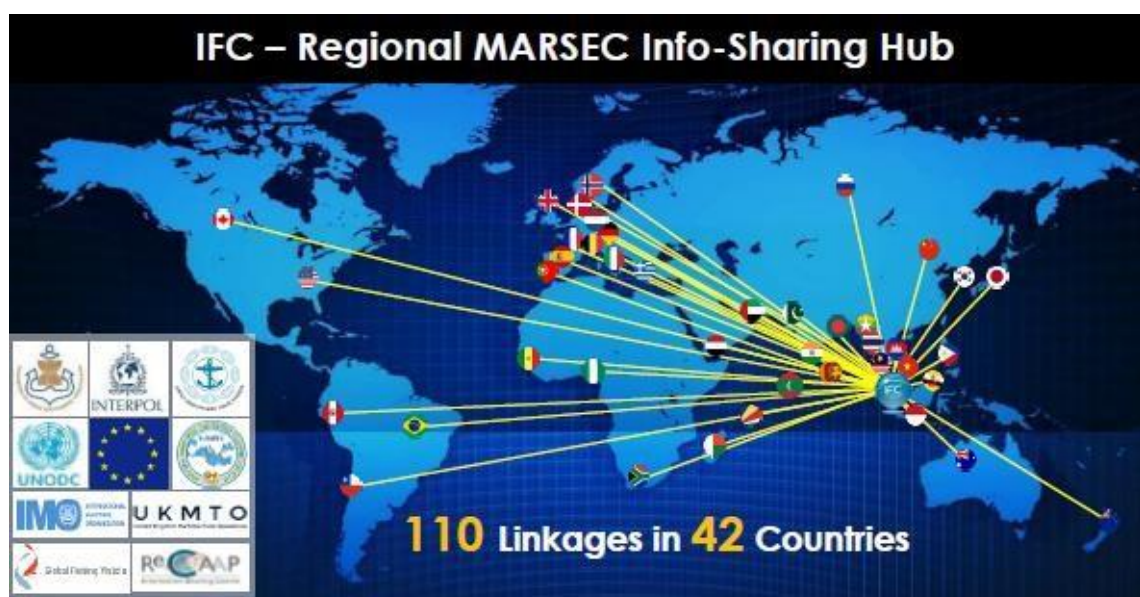
Untuk menjaga keamanan di Selat Malaka tersebut, maka perlu adanya suatu konsep keamanan dan kerjasama dari *littoral states*. Konsep keamanan (*security*) yang ada selama ini telah berkembang sejak pasca perang dingin dan berlanjut pada era globalisasi dewasa ini. Konsep ini telah diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang.

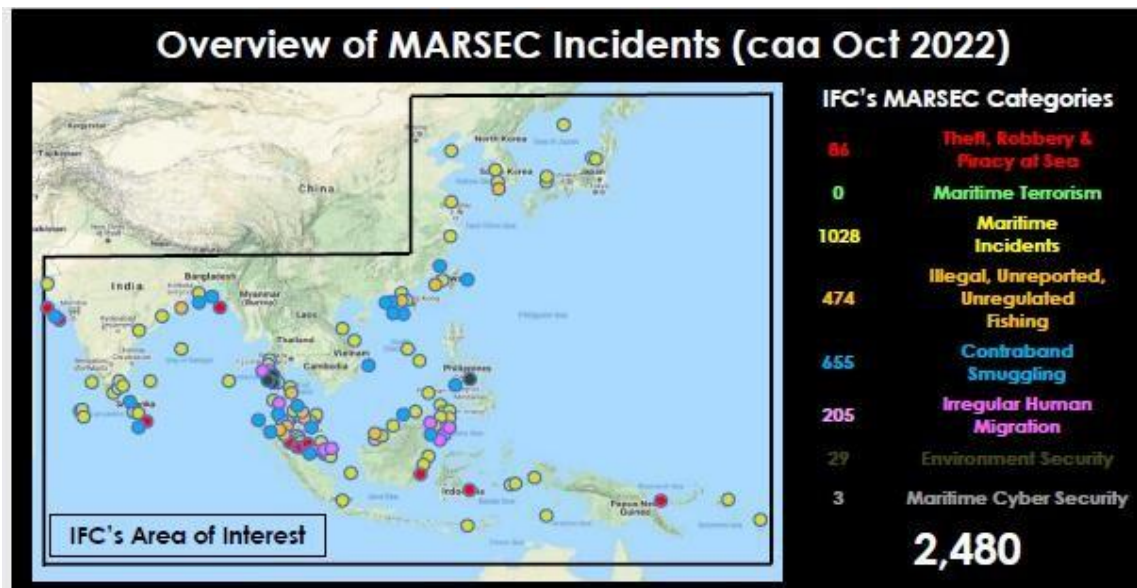
Dalam dunia kemaritiman, keamanan maritim juga telah meluas tidak hanya konsep pertahanan laut terhadap ancaman militer dari negara lain tetapi juga termasuk pertahanan terhadap ancaman non militer

antara lain perlindungan terhadap kelestarian alam, jalur perdagangan, pemberantasan aksi ilegal di laut, dan lain lain.

Perdagangan lintas laut adalah sumber kehidupan Singapura, selat Singapura dilewati lebih dari 1.000 (seribu) kapal dagang dalam sehari dan 800 (delapan) ratus kali pesawat Boeing 747 melintas di Singapura, oleh karenanya jika ada hal yang bermasalah pada *Chokepoint* walaupun untuk sementara dapat menyebabkan peningkatan biaya energi yang substansial bagi Singapura.

Oleh karenanya, Singapura sangat kosen terhadap ancaman keamanan maritim lintas batas di negaranya, dimana pelayaran global rentan terhadap ancaman kemanan maritim. Menurutnya tidak ada badan tunggal yang memiliki semua informasi, berbagi info sangat penting untuk laut yang aman bagi kita semua.





Singapura, menganggap sangat penting bagi *International Fusion Centre* (IFC) untuk selalu mendorong pertukaran informasi yang efektif untuk mendukung mitra *Maritime Security* (MARSEC), diantaranya mempromosikan Kerjasama antara mitra dari Badan Penegakan Hukum dan industri perkapalan.

Koordinasi antar instansi dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi di Selat Malaka, berjalan dengan baik karena setiap tahun setidaknya dilakukan 2 operasi gabungan termasuk pertemuan dalam rangka perancangan, operasi dan evaluasi pelaksanaan, dengan adanya forum tersebut memudahkan koordinasi penyelesaian atau tindak lanjut suatu permasalahan di Selat Malaka.

Koordinasi yang dilakukan merupakan kerjasama antara satu lembaga dengan lembaga lainnya sehingga *Maritime Security* (MARSEC)

dapat dilakukan semaksimal mungkin tanpa terjadi pelanggaran.

Selain patroli bersama dan penindakan pelanggaran seperti kerja sama patroli ReCAAP dan *Asean Maritime Forum* dan *Malacca Strait Sea Patrol*, juga dilakukan mekanisme pelaporan ke komando atas dan diterbitkan surat resmi untuk meminta bantuan dalam kejadian tersebut. Dari pelanggaran yang akan datang tidak melakukan perdagangan ilegal, perundingan membuat kesepakatan adat antar pihak yang bersengketa dan membuat kesepakatan adat antar warga perbatasan.

Komunikasi antar instansi dalam bentuk *sharing* informasi/data umum masih terjalin dengan baik. Komunikasi antar instansi berjalan berdasarkan tingkatan yaitu komunikasi taktis horizontal dan koordinasi antar unsur di lapangan serta komunikasi dan koordinasi taktis pula

secara vertikal kepada komando atas dalam rangka komando pengendalian operasional dan kewenangan masing-masing instansi.

## B. Interoperabilitas

*Interoperabilitas* adalah kemampuan suatu sistem, unit atau kekuatan untuk memberikan layanan kepada dan menerima layanan dari sistem, unit, atau kekuatan lain dan menggunakan layanan yang dipertukarkan untuk memungkinkan mereka beroperasi secara efektif bersama. (Hura et al., 2000)<sup>1</sup> menyatakan bahwa pada level strategis, interoperabilitas menciptakan kemungkinan untuk pengembangan kerja yang terintegrasi antar dimensi. Pada level ini, isu utama dalam *interoperabilitas* adalah harmonisasi pandangan, strategi, doktrin dan struktur kekuatan dari setiap dimensi. Pada tingkat taktis, strategi *interoperabilitas* negara harus berjalan seiring dengan teknologi interoperabilitas untuk membentuk lingkungan, mengelola krisis, dan memenangkan perang. Keunggulan *interoperabilitas* pada level taktis dapat diperoleh dari *ekuivalensi/interchangeability* dari setiap elemen dimensi. Interoperabilitas mencerminkan interaksi antara organisasi dan sistem (Hura et al., 2000).<sup>2</sup>

Untuk mewujudkan tingkat *interoperabilitas* dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa instansi atau angkatan diperlukan untuk menjalankan suatu misi agar dapat dilaksanakan secara efektif melalui cara yang baik dan benar koordinasi, karena pada prinsipnya mewujudkan *Interoperabilitas* berarti mengupayakan persatuan untuk mencapai tujuan yang sama, dengan kata lain, meskipun kerangka pengamanan perbatasan di Selat Malaka melibatkan banyak instansi atau instansi yang berwenang namun pada dasarnya semuanya bertujuan untuk menjaga *kondusifitas* Malaka. Selat sebagai jalur air penting yang digunakan oleh lalu lintas pelayaran internasional sebagai bentuk tanggung jawab negara pantai dalam menjamin keamanan maritim, khususnya di Selat Malaka.

Dengan adanya interoperabilitas antar satuan keamanan laut perbatasan maka akan mudah untuk berkoordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diemban secara bersama-sama. Interoperabilitas adalah aplikasi yang berinteraksi dengan aplikasi lain melalui protokol yang disepakati bersama melalui jalur komunikasi.

---

<sup>1</sup> Hura, M., McLeod, G., Larson, E., Schneider, J., & Gonzales, D. (2000). *Interoperabilitas. Tantangan*

berkelanjutan dalam operasi udara koalisi. Rand Corp Santa Monica Ca.

<sup>2</sup> *ibid*



Kerjasama sangat diperlukan karena penanganan perbatasan tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh institusi, tidak hanya pada aspek ekonomi, sosial tetapi juga pada pertahanan dan keamanan suatu negara.

Mewujudkan interoperabilitas tidak lepas dari penggunaan data bersama. Indonesia telah menerapkan berbagi data yang difasilitasi oleh Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla RI) melalui *web browser* dengan akses data/info dan kemampuan mendeteksi kapal yang melintas atau beroperasi di Selat Malaka. *Sharing* data terutama antara masing-masing pusat informasi maritim di masing-

masing negara seperti *International Fusion Centre* (IFC) di Singapura (dimana TNI Angkatan Laut Indonesia juga menempatkan ILO disana). Dalam kontak pengelolaan infrastruktur kawasan perbatasan, dilakukan *sharing* data melalui pemutakhiran data yang dimiliki oleh *stakeholders*, sehingga diperoleh data bersama sebagai bahan perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan. Keberadaan pusat informasi kemaritiman ini sangat membantu dalam membangun kesadaran domain maritim di daerah sehingga setiap kejadian dapat ditindaklanjuti atau ditanggapi dengan segera.



## KESIMPULAN

Menciptakan kondisi keamanan laut sepanjang Selat Malaka bukanlah hal seserhana. Dinamika situasi setiap saat selalu berubah akibat kondisi cuaca, keamanan bernavigasi sejumlah kapal yang melintas baik domestik maupun

internasional, berbagai kegiatan ilegal yang lazim terjadi di perairan perbatasan, kecelakaan laut dan lain sebagainya memerlukan konsentrasi tinggi menciptakan keamanan laut yang kondusif Selat Malaka sepanjang waktu



Aktivitas rutin mengendalikan operasi keamanan laut yang digelar dikendalikan tidak hanya dari Ruang Kendali Operasi, namun Danguskamla Koarmada I, Laksma TNI Yayan Sofiyan, S.T. kerap *onboard* di Kapal Markas maupun di Pesud Patmar maupun Helly BO yang di BKO kan kepada Guskamla I.<sup>3</sup>

Saat musim utara tiba antara bulan Desember - Maret, aktivitas pembuangan limbah kerap menimbulkan pencemaran di sejumlah perairan dan Pantai Kepri. Demikian juga aktivitas lego jangkar di Perairan Tanjung Berakit oleh kapal-kapal asing berukuran raksasa secara ilegal dan perairan diluar area lego jangkar memerlukan penanganan yang intensif.

Lebih lanjut, dalam mewujudkan *interoperabilitas* antar Pelaku Keamanan, tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi

yang ada. Terutama teknologi yang berkaitan dengan pengolahan data, manajemen informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Pengamanan kawasan Selat Malaka berusaha mengikuti dan memanfaatkan kemajuan teknologi. Beberapa aplikasi dalam pengelolaan keamanan perbatasan di Selat Malaka antara lain: Aplikasi *Integrated Maritime Surveillance System* (IMSS) dan Aplikasi *Maritime Surveillance*; Aplikasi Dasbor; Aplikasi Koordinasi Bersama; Aplikasi terkait AIS, Radar, Kamera Jarak Jauh, data deteksi CAIT; dan aplikasi CTDL.

Apapun pekerjaan yang kita emban laksanakan dengan ikhlas dan amanah serta sungguh-sungguh, tentunya hal tersebut tidak akan terasa berat. Demikian disampaikan Laksma TNI Yayan Sofiyan,

<sup>3</sup> "Pantau Keamanan Laut Selat Malaka Dari Udara", <https://tni.mil.id/>, <https://tni.mil.id/view-172045->

[pantau-keamanan-laut-selat-malaka-dari-udara.html](https://tni.mil.id/view-172045-pantau-keamanan-laut-selat-malaka-dari-udara.html), diakses 8 December 2022

S.T. saat selesai mengikuti patroli udara di sepanjang Selat Malaka.<sup>4</sup>

## PENUTUP

Keamanan merupakan hal yang sentral dalam keamanan maritim karena menyangkut kepentingan lingkungan dan segala sesuatu yang terjadi di laut. Keamanan maritim juga semakin penting dan krusial karena dapat sekaligus menjadi target dan target potensial (misalnya perompak, teroris, atau penjahat) sekaligus sebagai pelaku potensial (dengan terlibat dalam kejahatan maritim seperti perdagangan manusia, penyelundupan barang), senjata atau bekerjasama dengan pelaku kejahatan di laut).

Keamanan maritim juga terkait erat dengan pembangunan ekonomi. Selama berabad-abad telah terbukti bahwa lautan selalu menjadi faktor penting dalam ekonomi. Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jalur laut dan perikanan tangkap merupakan industri yang memiliki prospek yang baik mengingat sumber daya ikan yang tersedia melimpah.

Tentunya dengan terwujudnya interoperabilitas antar aktor keamanan

akan mewujudkan saling keterpaduan dan sinergi kerjasama dalam mewujudkan keamanan maritim di Kawasan Selat Malaka. Terwujudnya *interoperabilitas* dalam keamanan maritim di perbatasan laut Indonesia di Selat Malaka yaitu memotong jalur birokrasi, mampu menyatukan upaya dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan bersama sehingga lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

“*Pantau Keamanan Laut Selat Malaka Dari Udara*”, <https://tni.mil.id/>, <https://tni.mil.id/view-172045-pantau-keamanan-laut-selat-malaka-dari-udara.html>, diakses 8 December 2022

Hura, M., McLeod, G., Larson, E., Schneider, J., & Gonzales, D. (2000). *Interoperabilitas. Tantangan berkelanjutan dalam operasi udara koalisi*. Rand Corp Santa Monica Ca.

“*Indonesian Sea Border Security in Malacca Strait*”, *Baltic Journal of Law & Politics a Journal of Vytautas Magnus University*

---

<sup>4</sup> *ibid*